

Keberagaman harus Menjadi Dasar

Oleh: Brigida Intan Printina

INDONESIA telah dihujani permasalahan menyangkut keutuhan negara. Bahkan media sosial yang harusnya menjadi sarana komunikasi dan informasi yang efektif, saat ini dibanjiri berita politik berbau sara yang hampir setiap hari terpampang dan menjadi topik utama. Indonesia sebenarnya hanya perlu bercermin dari usaha negara satu budaya yang juga memiliki banyak benturan dalam memperjuangkan persatuan negara dalam ideologi yang kuat.

Negara Tuhan

Negara Arab merupakan negara penyumbang potensi budaya yang begitu besar bagi persatuan negara-negara Arab di bawah ideologi nasional dan Pan-Arabisme. Sama seperti Indonesia, nasionalisme Arab juga memiliki kepribadian dan kebudayaan Arab, kemerdekaan, persatuan, pembaharuan dan kemajuan baik material maupun spiritual. Namun, negara Arab belum bisa menyelaraskan Pan-Arabisme dengan nasionalisme negara sebagai kekuatan yang utuh. Ini terbukti ketika Palestina berkonflik dalam peperangan yang terjadi antara tahun 1948 hingga 1967. Arab menolak resolusi PBB tahun 1947 yang membagi wilayah Palestina menjadi Arab, Yahudi dan Yerusalem. Negara Yahudi tidak sesuai dengan

konsep Pan-Islamisme, maka terjadilah perang di mana Israel berhasil merebut wilayah Arab. Meski konflik telah dipulihkan dengan perjanjian damai *Camp David* 1980-an, namun masih saja terjadi serangan balik oleh Israel di Sabra dan Satila tahun 1988. Pada saat itu pula lahir gerakan perlawanan Islam bernama Gerakan Intifadha sebagai reaksi terhadap tindakan perlawanan Israel.

Konflik yang sama mengenai masalah keyakinan juga terjadi antara Irak dan Iran yang dipahami sebagai konflik bawaan yang diwariskan semenjak abad ke VIII hingga abad XXI belum dapat terselesaikan. Beberapa konflik seperti yang terjadi di Timur Tengah bahkan menunjukkan representasi ideologi "Negara Tuhan" yang berkembang secara intensif di Indonesia saat ini. Negara semakin rumit apabila hukum dan pemerintah tidak tegas terhadap bentuk radikalisme. Jika tidak dihadang, Indonesia akan berujung kepada konflik eksternal seperti yang dialami negara-negara di Timur Tengah pada akhir abad XIX.

Persoalan kebebasan beragama dapat menjadi pelatuk dari tindakan

anarki masyarakat dengan perbedaan-perbedaan latar belakang. Hal ini berarti bahwa esensi kebebasan beragama yang tidak dipahami dengan baik dan memadai akan diikuti oleh tiadanya kesadaran akan pentingnya kehadiran kebebasan sesama yang berbeda. Diawali dari suatu paham pemicu intoleran, sudah sangat jelas tidak ada bangsa yang mendukung berkembangnya sikap radikalisme di negara ini. Atas nama radikalisme itulah, demokrasi menjadi luntur dan menepis segala bentuk toleransi yang telah menjadi tradisi di Indonesia. Bagai laka yang tak terobati, radikalisme akan membudaya bahkan bangsa yang dahulu diperjuangkan dengan semangat patriotisme dan kebhinnekaan akan musnah. Radikalisme tersebut tampak dalam gambaran diri seseorang atau kelompok yang mengatasnamakan agama, seolah bebas melakukan *anarchy* yang dapat berkembang menjadi *mass movement* untuk menunjukkan perasaan dan keinginan.

Negara Pancasila

Seerti ungkapan para *founding fathers* dan Gus Dur tentang ketidakmungkinan ada NKRI jika tidak ada

Pancasila sebagaimana yang dikatakan Masdar Farid Mas'udi (tokoh Nahdatul Ulama), bahwa NKRI menempatkan penguasa tertinggi adalah rakyat, republik, sehingga menuntut adanya demokrasi. Untuk itu negara Indonesia bukan milik satu penguasa dan satu kelompok namun milik bersama, menghargai keragaman di tanah yang kita tempati sebagai negara plural.

Untuk kemerdekaan bagi masa depan inilah, Pancasila menyediakan secara baik sarana untuk membangun masyarakat bangsa yang plural. Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan agama, yang menerima Pancasila sebagai pernyataan ideologis tentang toleransi dan komitmen untuk menghindari lahirnya perilaku-perilaku politik yang sifatnya "eksklusif". Toleransi dan keberagaman di Indonesia harus dijadikan dasar bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Tanpa toleransi di antara umat beragama, maka demokrasi tidak akan pernah bisa dikembangkan. **

Brigida Intan Printina, M.Pd

Dosen di FKIP Pendidikan Sejarah,
Univ. Sanata Dharma, Yogyakarta

WWW.

<http://cetak.harianbernas.com/25285>